

GUYUB

Journal of Community Engagement

Vol. 1, No. 3, Desember 2020



Mengembangkan Kecerdasan Majemuk pada Generasi Milenial Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama Malang

Retno Sulistyaningsih¹, Nur Eva², Nur Rohmah Hidayatul Qoyyimah³,
Najway Azka Ar-Robbaniy⁴, Sri Andayani⁵

Pendampingan Komunitas Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dalam Pembelajaran Al-Mufradat melalui Media Flash Card di Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) Al-Qodiri Jember

Muhammad 'Ainul Yaqin¹, Muhammad Yunus², Muhammad Risqi³

Pendampingan Manajemen Resiko Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri

Ali Syahidin Mubarak

GUYUB

Journal of Community Engagement

GUYUB

Journal of Community Engagement

Vol. 1, No. 3, 2020

Editor in Chief

Achmad Fawaid, (SCOPUS ID: 57214837323)

Managing Editors

Hasan Baharun, (ID SCOPUS : 57200983602)

Sugiono Sugiono, (SCOPUS ID : 57199578160)

Ismail Marzuki, (SCOPUS ID: 57201500245)

Subhan Rachman, (SCOPUS ID: 57192937912)

Nurul Huda, (SINTA ID: 6119615)

Syamsuri, (SINTA ID: 6116825)

Ridhatullah Assya'bani, (SINTA ID: 6200862)

Peer Reviewers

Sukamto Sukamto, (SINTA ID: 5979034), Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

Deny Utomo, (SINTA ID: 6016108), Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Miftahul Huda, (SINTA ID: 6171566), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Fariz Alnizar, (SCOPUS ID: 6659824), UNUSIA Jakarta, Indonesia

Fuad Rahman, (SCOPUS ID: 57201474778), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Saifuddin Zuhri Qudsy, (SCOPUS ID: 57213595165), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Akhmad Anwar Dani, (SINTA ID: 14305), IAIN Surakarta, Indonesia

Maufur Maufur, (SINTA ID: 5989329), IAIN Kediri, Indonesia

Siti Mahmudah Noorhayati, (SINTA ID: 6726997), IAIN La Roiba Bogor, Indonesia

Busro Busro, (SCOPUS ID: 57205022652), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Akmal Mundi, (SCOPUS ID: 57205059378), UNUJA Probolinggo, Indonesia

Section Editor

Ahmad Zubaidi, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

GUYUB: Journal of Community Engagement is a multidisciplinary journal which aims to disseminate the conceptual thoughts and research results in the area of community service. This journal focuses on the main problems of the community engagement areas, such as (1) training, marketing, appropriate technology, design; (2) student community services; (3) community empowerment, social access; (4) education for sustainable development, etc.

GUYUB: Journal of Community Engagement is published three times a year (April, August, December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Editorial Office:

GUYUB: Journal of Community Engagement

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: jurnal.guyub@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/index>

Tables of Content

157-166

Mengembangkan Kecerdasan Majemuk pada Generasi Milenial Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama Malang

***Retno Sulistyaningsih, Nur Eva, Nur Rohmah Hidayatul Qoyyimah,
Najway Azka Ar-Robbaniy, Sri Andayani***

167-178

Pendampingan Komunitas Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dalam Pembelajaran AI-Mufradat melalui Media Flash Card di Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) AI-Qodiri Jember

Muhammad 'Ainul Yaqin, Muhammad Yunus, Muhammad Risqi

179-190

Pendampingan Manajemen Resiko Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri

Ali Syahidin Mubarok

191-203

KKM Refungsionalisasi Masjid: Optimalisasi Fungsi dan Peran Masjid Al-Ikhlas Dusun Glundengan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Finadatul Wahidah, Abdul Sholeh, Putri Nur Hayati

204-214

Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Program Kerja Berbasis Android pada Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid

Fathorazi Nur Fajri, Kamil Malik, Halimatus Sa'diya

215-226

Perancangan Sistem Monitoring Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan Mobile App Android untuk Biro Kepegawaian Universitas Nurul Jadid

Fathorazi Nur Fajri, M. Noer Fadli Hidayat, Suci Rahayu Agustini

227-237

Pengembangan Sistem Online Pendaftaran Santri Baru untuk Penguatan Manajemen Informasi Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah Situbondo

Fathorazi Nur Fajri, Wali Ja'far Shudiq, Nurul Hidayattun Nasyyihin

Pendampingan Manajemen Resiko Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri

Ali Syahidin Mubarak¹

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung,
Jl Mayor Sujadi Timur no.46 Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung¹

{ alisyahidin@iain-tulungagung.ac.id }

Submitted: 25 November 2020

Received: 30 November 2020

Published: Desember 2020

Keywords:
Risk
Management,
Pandemic,
Regional Election

Abstract. The implementation of the 2020 regional elections during a pandemic Covid-19 has pros and cons. The two parties demanded certainty in the security of the implementation of various aspects, especially the safety and health of all participants in the regional elections. This study seeks to explain the impact of providing risk management training to PPS and KPPS officers. This research is a qualitative research with a case study approach. The number of participants in this study was 14 people. Data were collected by means of observation and interviews. The results showed that the provision of risk management training could increase the knowledge of PPS and KPPS officers regarding the risks that could arise during the election process. Risk management training is one way to equip PPS and KPPS officers in mitigating during the local elections. Massive training is required to provide an understanding of potential risks and an understanding of the main duties and functions of PPS and KPPS officers.

Katakunci:
Manajemen
Risiko, Pandemi,
Pilkada

Abstrak. Pelaksanaan pilkada 2020 dalam masa pandemi mengalami pro-kontra. Kedua pihak menuntut adanya kepastian keamanan penyelenggaraan dari berbagai aspek, khususnya keselamatan dan kesehatan seluruh partisipan dalam pilkada. Penelitian ini berupaya menjelaskan dampak pemberian pelatihan manajemen risiko pada petugas PPS dan KPPS. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pelatihan manajemen risiko dapat menambah pengetahuan petugas PPS dan KPPS terkait risiko-risiko yang dapat muncul selama proses pilkada berlangsung. Pelatihan manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk membekali petugas PPS dan KPPS dalam melakukan mitigasi saat pilkada berlangsung. Diperlukan pelatihan secara masif untuk memberikan pemahaman tentang potensi risiko serta pemahaman tugas pokok dan fungsi sebagai petugas PPS dan KPPS.

1 PENDAHULUAN

Dilansir oleh *Kompas.com* (2020) Pemilu tahun 2019 menyisakan berita buruk dengan meninggalnya 894 petugas KPPS dan 5.175 dalam kondisi sakit. Beban kerja yang cukup besar diklaim menjadi penyebab banyaknya petugas KPPS yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal. Sayangnya, peristiwa tersebut hanya ditanggapi dengan peralihan proses penghitungan menjadi e-rekapitulasi. Padahal fakta yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan (CNN, 2019) terdapat 13 penyakit yang menyebabkan petugas KPPS tersebut meninggal dunia. Fakta ini tentu menolak anggapan petugas KPPS meninggal karena kelelahan. Faktor kesehatan menjadi isu utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu.

Menilik pelaksanaan Pilkada tahun 2020 nanti, proses pesta demokrasi kali ini menjadi sangat berbeda karena adanya pandemi. Isu kesehatan yang pernah terjadi pada Pemilu 2019 lalu menjadi lebih berat karena adanya faktor kesehatan lain pada pilkada tahun ini. Pilkada di tengah pandemi ini juga telah banyak disorot banyak pihak, baik yang pro pelaksanaan maupun kontra pelaksanaan. Hal ini ditambah dengan belum menurunnya angka penyebaran Covid-19 yang justru semakin hari semakin meningkat grafiknya (*detiknews.com*, 2020).

Permasalahan klasik terkait penyelenggaraan pemilu maupun pilkada adalah ketersediaan sumber daya manusia. Beberapa daerah penyelenggara pilkada nyatanya masih belum bisa mencapai target pendaftar, seperti yang terjadi di Kota Samarinda (*Kaltim Today*, 2020) dan Kabupaten Indramayu (*Ayocirebon.com*, 2020) meskipun honorarium pada pilkada 2020 mengalami kenaikan. Ismanu (2020) menjelaskan berdasarkan hasil analisis penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, terdapat 3 faktor utama dalam rekrutmen petugas KPPS. Pertama, informasi rekrutmen yang terbatas, hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Kedua, honor yang tidak sesuai dengan beban kerja. Ketiga, informasi rekrutmen pada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah semakin dipersempit karena dianggap akan menguntungkan salah satu calon anggota legislatif.

Problem-problem yang terjadi pada sumber daya manusia petugas PPS dan KPPS adalah disproporsionalitas beban tugas (Susanto, 2017) yang mengakibatkan pada kinerja yang tidak beraturan serta melakukan hal-hal yang bukan menjadi wewenangnya. Temuan Gorantokan (2018) pada penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di Provinsi DI Yogyakarta adalah

ketidaktahuan KPPS terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran pada proses administratif. Hal senada juga diungkapkan oleh Sugihariyadi dan Rahardjo (2015) terkait profesionalitas petugas KPPS di kabupaten rembang. Lebih lanjut, Rahmad dan Fahmi (2019) mengajukan tawaran rekonstruksi tugas petugas KPPS sebagai refleksi penyelenggaraan pemilu 2019 berupa pembagian tugas diantara petugas KPPS, proses rekapitulasi serta pemahaman dampak yuridis dari proses pemungutan hingga penghitungan suara.

Terkait dengan pandemi, permasalahan sumber daya manusia menjadi bertambah terkait kesadaran pentingnya kondisi kesehatan. Beberapa petugas kpps di jawa tengah misalnya, menolak melakukan rapid tes karena takut hasilnya akan reaktif (Kompas, 2020b), padahal 70 orang calon kepala daerah terindikasi positif covid-19 dan 3 diantaranya meninggal dunia (CNN, 2020b) meskipun hal ini ditolak oleh KPU karena dianggap sudah sakit sebelum mengikuti tahapan pilkada. Contoh lain, KPU Kota Denpasar telah melaksanakan rapid test pada 10.818 orang anggota KPPS dan mendapati hasil 1.106 orang reaktif covid-19 (CNN, 2020a).

Problem-problem diatas memperlihatkan peliknya menjadi petugas PPS dan KPPS sebagai garda terdepan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adanya buku panduan bagi petugas PPS dan KPPS setebal 112 halaman tidak menjelaskan hak-hak yang diperoleh oleh petugas KPPS. Hal ini belum banyak dipahami oleh petugas PPS dan KPPS. Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada tidak memberitahukan risiko menjadi petugas KPPS kepada pendaftar (Tirto.id, 2019). Pemberitahuan hanya terkait tugas selama menjadi KPPS, teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Adhyaksa (2020) mengkritisi pemerintah sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap keselamatan petugas PPS dan KPPS, tidak hanya berdasarkan hukum tetapi juga pada aspek-aspek lainnya.

Pilkada Kabupaten Kediri kali ini sedikit berbeda karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. 28 pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini, terdapat 25 daerah yang hanya memiliki calon tunggal termasuk didalamnya adalah Kabupaten Kediri. Adanya calon tunggal tersebut tidak mengurangi risiko-risiko dalam proses penyelenggaraan pilkada. Penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2018 misalnya, pilwali yang diadakan di Kota Makassar secara mengejutkan memenangkan kotak

kosong (Detik, 2018). Hal ini menjadi satu perhatian tertentu untuk menghadapi adanya relawan kotak kosong karena tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat pada calon tunggal tersebut. Risiko selama pelaksanaan pilkada pasti akan tetap ada.

Manajemen risiko adalah sebuah proses terstruktur dan sistematis dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengembangan cara-cara alternatif dalam penanganan risiko, dan proses monitoring serta pengendalian penanganan risiko (Djohanputro, 2008). Menurut Kildow (2014 dalam Alihodžić, 2016)), manajemen risiko adalah kebijakan, prosedur dan praktik yang terlibat dalam identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan penghindaran, minimalisasi atau penghilangan risiko yang tidak dapat diterima. Adapapun manajemen risiko pemilu merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu (Alihodžić, 2016).

Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada menemukan adanya lemahnya manajemen risiko yang diberikan kepada petugas PPS dan KPPS (Tribunnews.com, 2019). Menanggapi tetap diadakannya pilkada serentak tahun 2020 ini, Eko Prasajo yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia mendorong pemerintah untuk menyusun mitigasi risiko pelaksanaan pilkada tahun 2020 (BeritaSatu.com, 2020). Berkaca dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019, pemerintah memang sudah menjamin anggota KPPS melalui skema asuransi, tetapi itu diberikan setelah adanya kejadian petugas KPPS yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia, sebab secara undang-undang tidak terdapat regulasi yang mengatur untuk jaminan kesehatan (Sejati & Darmaningtyas, 2019).

Berangkat dari problematika tersebut, penulis menginisiasi sebuah kegiatan yang bertajuk Pelatihan Manajemen Risiko pada Petugas PPS dan KPPS yang mengambil lokasi di Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini ditujukan untuk memberitahukan kepada petugas PPS dan KPPS akan risiko-risiko yang akan dihadapi selama proses pilkada berlangsung dari pra pilkada hingga pasca pilkada.

2 METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Pendekatan yang dipilih digunakan untuk memahami pengetahuan partisipan setelah mendapatkan pelatihan manajemen risiko. Partisipan pada penelitian ini berjumlah 14 orang dengan rincian 6 orang petugas PPS dan 8 orang ketua KPPS. Partisipan diberikan tentang manajemen risiko oleh narasumber ahli di bidangnya. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Peneliti hadir sebagai *observer as participant* untuk mengikuti langsung proses pelatihan yang diberikan. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan jenis Data Driven, yaitu analisis data secara induktif dari data yang sudah dikumpulkan (Boyatzis, 1998).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan manajemen risiko ini dilaksanakan pada hari sabtu, 21 November 2020 di Balai Desa Bendosari Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Acara di mulai pukul 13.30-15.00 WIB. Narasumber yang dihadirkan adalah psikolog industri dan organisasi. Adapun materi yang diberikan selama pelatihan adalah: a) pengetahuan umum tentang pelaksanaan pra pemilu hingga pasca pemilu, b) potensi konflik yang terjadi selama pra hingga pasca pemilu. Masuk pada materi utama terkait manajemen risiko, partisipan diberikan pengetahuan tentang identifikasi risiko dan penentuan tindakan yang akan dilakukan.

Pada proses pemahaman tentang identifikasi risiko, partisipan diberikan pemahaman tentang faktor internal dan eksternal sebagai pemicu risiko. Secara internal, risiko yang bisa muncul apabila proses perencanaan dari pihak penyelenggara tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Misalnya data daftar pemilih tetap yang tidak sesuai, alat pendukung pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai, jadwal penyelenggaraan yang kacau, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta sengketa hasil pemilu.

Faktor eksternal yang menjadi risiko bisa berupa kondisi sosial-ekonomi yang beragam, pemberitaan media yang tidak seimbang, adanya provokator selama proses pemilu berlangsung, hingga faktor non teknis seperti hujan lebat, banjir, bencana alam lain yang membuat proses pilkada terhambat.

Penjelasan mengenai risiko-risiko yang bisa muncul selama proses pemilu tersebut dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tindakan yang harus diambil atau dibuat untuk antisipasi risiko-risiko yang sudah dipetakan. Partisipan secara khusus diberikan pemahaman tentang manajemen emosi dalam menghadapi protes ataupun faktor eksternal lainnya. Tujuan pemberian manajemen risiko yang lebih spesifik dengan asumsi terkait problem internal sudah ditangani oleh PPK selaku pengawas dan penanggung jawab petugas PPS dan KPPS di tingkat desa dan dusun. Faktor eksternal menjadi fokus utama karena sifatnya yang teknis dan non teknis.

Partisipan diberikan pemahaman tentang manajemen emosi. Partisipan yang telah memahami bagaimana melakukan identifikasi risiko secara internal dan eksternal, diminta untuk bisa mengatur sisi emosi sebagai salah satu faktor manajemen risiko yang harus mendapat perhatian ekstra. Partisipan diberikan pemahaman bahwa emosi tidak hanya terkait dengan marah, emosi merupakan ekspresi perasaan hati yang bisa berupa marah, bahagia, jijik, takut, sedih atau terkejut. Pada bagian ini terlihat beberapa partisipan baru memahami tentang emosi.

Pada sesi tanya jawab dengan narasumber, terdapat partisipan yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai KPPS. Partisipan tersebut menanyakan langkah apa yang diambil ketika terjadi sengketa hasil pilkada. Partisipan mendapat penjelasan mengenai tugas KPPS bahwa sengketa hasil pilkada bukan menjadi wilayah KPPS, melainkan PPK sebagai pengawas dan penanggung jawab pelaksanaan pilkada mulai tingkat dusun hingga kecamatan.

Selama mengikuti dan mengamati proses pelatihan yang diberikan, terlihat partisipan mendapatkan pemahaman baru terkait tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Partisipan juga mulai memahami tentang hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga mampu melakukan identifikasi risiko-risiko yang akan mereka hadapi serta bagaimana cara yang akan dihadapi. Partisipan di akhir pelatihan juga sudah mampu mempersiapkan diri untuk menyambut proses pilkada yang akan segera berlangsung.

Diskusi

Pelatihan manajemen risiko merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap kondisi petugas PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pilkada. Pelatihan

ini merujuk pada laporan tahunan Ombudsman RI yang salah satu bahasannya terkait pelaksanaan pemilu tahun 2019 (Ombudsman, 2019). Terjadi maladministrasi yang menyebabkan petugas KPPS jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia. Adrianus Meliala (Tirto.id, 2019) lebih lanjut menjelaskan bahwa banyak peserta KPPS yang tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini pula yang membuat asumsi bahwa petugas PPS dan KPPS juga tidak bisa melakukan mitigasi dalam proses pemilu saat itu, karena tidak mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan pilkada kali ini yang akan berlangsung dalam kondisi pandemi telah mendapat pandangan pro-kontra. Sempat terhenti karena adanya pandemi, proses pilkada tahun 2020 akhirnya dilanjutkan kembali. Hasil penelurusan IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) selama delapan bulan (februari-november 2020) sejak pandemi berlangsung menunjukkan bahwa terdapat 73 negara yang mengambil keputusan untuk menunda menyelenggarakan pemilu, 39 negara dipastikan menunda pemilu. Data berikutnya, dari 84 negara yang memutuskan tetap melaksanakan pemilu, 67 negara telah melaksanakan pemilu.

Catatan yang dibuat oleh Herdiansyah Hamzah (Hamzah, 2020) menjelaskan bahwa partisipasi pemilih pada negara yang tetap menggelar pemilu di tengah pandemi mengalami penurunan. Hal ini sangat berbeda dengan keyakinan KPU yang menilai partisipasi pemilih pada pilkada 2020 justru akan meningkat. Polandia dan Korea Selatan menjadi contoh suksesnya pelaksanaan pemilu di tengah pandemi. Korea Selatan justru mengalami peningkatan sebesar 8,18% dari pemilu sebelumnya, serta polandia yang mengalami peningkatan partisipasi sebesar 12.54% dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Data tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri serta menjadi pemacu tetap diadakannya pilkada pada tahun 2020 ini. Tetapi hal tersebut tidak membuat upaya penyelenggara pemilu untuk memberi perhatian lebih pada petugas PPS dan KPPS sebagai garda terdepan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Lebih lanjut Hamzah (Hamzah, 2020) memetakan potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi pada proses pilkada tahun ini. Potensi pelanggaran tersebut diantaranya adalah pragmatisme politik, ancaman keselamatan warga terkait penyebaran virus covid-19, hak pilih warga yang terancam karena pandemi serta politisasi bansos terkait covid-19.

Terkait hal tersebut, pelatihan yang diberikan sudah sangat jelas menjelaskan tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang harus dihadapi oleh petugas PPS dan KPPS selama penyelenggaraan pilkada. Partisipan juga mulai menyadari menjadi petugas PPS dan KPPS tentu sangat berat, meskipun hanya ada satu calon tunggal. Kubu pro dan kontra terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi juga mengajukan syarat yang sama jika harus tetap dilakukan, yakni pelaksanaan teknis yang tidak merugikan siapapun dalam pelaksanaan nanti (Rizki & Hilman, 2020).

Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi tentu mensyaratkan banyak hal, utamanya jaminan keselamatan pada pemilik hak pilih juga seluruh lapisan penyelenggara. Menurut Nuryanti dkk (Nuryanti, Sweinstani, & Sorik, 2020), ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Pertama, kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara, peserta dan pemilih. Kedua, format pelaksanaan pilkada yang aman dari Covid-19. Ketiga, kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah. Keempat, isu anggaran dan permasalahan teknis lainnya. Setidaknya, pelatihan yang diberikan sudah mencakup aspek pertama dan keempat pada bagian teknis, sebab bagian kedua dan ketiga murni terkait internal di KPU yang tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu ketua KPPS mengenai sengketa politik, pelatihan ini juga telah memberikan wawasan baru terkait apa yang menjadi tanggung jawab ketua KPPS dan anggotanya. Hal tersebut menjawab permasalahan disproporsionalitas beban tugas KPPS yang disimpulkan oleh Susanto (Susanto, 2017) terkait analisisnya pada penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014.

Pelatihan ini juga menjawab terkait rekonstruksi pembagian tugas KPPS yang ditawarkan oleh Rahmad dan Fahmi (Rahmad & Fahmi, 2019). Manajemen risiko yang diberikan pada pelatihan ini juga mencakup bagaimana masing-masing anggota memahami dan akan menjalankan tugas sebagaimana yang telah diberikan oleh masing-masing ketua KPPS. Manajemen risiko yang diberikan sifatnya lebih pada persiapan secara individual, sebab secara kelompok sudah menjadi tanggung jawab PPK sebagai koordinator bagi masing-masing PPS.

4 KESIMPULAN

Pemberian pelatihan manajemen risiko pada petugas PPS dan KPPS yang telah dilakukan banyak memberikan manfaat serta direspon positif. Pelatihan manajemen risiko mampu memberikan wawasan baru terkait tugas pokok, fungsi, serta beban tugas yang benar-benar menjadi tanggung jawab mereka sebagai petugas PPS dan KPPS. Pelatihan ini juga membekali masing-masing petugas kemampuan untuk menganalisa munculnya risiko selama pelaksanaan pilkada, namun juga mampu memberikan gambaran akan tindakan yang mereka ambil ketika menghadapi problem selama proses pilkada berlangsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membekali petugas PPS dan KPPS pengetahuan tentang mitigasi akan risiko-risiko yang akan dihadapi selama pelaksanaan pilkada. Bagi peneliti selanjutnya, tahapan pemberian pelatihan manajemen risiko bisa ditingkatkan pada level praktikum untuk memberikan gambaran langsung problem-problem yang akan terjadi saat pilkada berlangsung. Adapun bagi penyelenggara pilkada, pelatihan ini diharapkan bisa menjadi salah satu agenda penting selain bimbingan teknis yang sifatnya hanya terjadi pada hari pelaksanaan pilkada, padahal risiko bagi petugas PPS dan KPPS bisa terjadi pra sampai pasca pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, F. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap petugas PPS dan KPPS sebagai korban penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 21-30–30. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3530>
- Alihodžić, S. (2016). *Risk management in elections*. Stockholm: International for Democracy Electoral Assistance.
- Ayocirebon.com. (2020). Pendaftar Petugas KPPS Minim, Ini Strategi KPU Kabupaten Indramayu. Diambil 29 November 2020, dari AyoCirebon.com website: <http://www.ayocirebon.com/read/2020/10/19/6811/pendaftar-petugas-kpps-minim-ini-strategi-kpu-kabupaten-indramayu>

- BeritaSatu.com. (2020). Pemerintah Diminta Segera Susun Mitigasi Risiko Pilkada 2020. Diambil 30 November 2020, dari Beritasatu.com website: <https://www.beritasatu.com/yudodahono/politik/686621/pemerintah-diminta-segera-susun-mitigasi-risiko-pilkada-2020>
- Boyatzis, R. E. (1998). *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. USA: Sage Publication.
- CNN, I. (2019). Kemenkes Temukan 13 Penyakit Penyebab Petugas KPPS Meninggal. Diambil 29 November 2020, dari Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190513094133-20-394284/kemenkes-temukan-13-penyakit-penyebab-petugas-kpps-meninggal>
- CNN, I. (2020a). 1.106 Petugas KPPS Pilkada Kota Denpasar Reaktif Covid-19. Diambil 29 November 2020, dari Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201119142823-32-571883/1106-petugas-kpps-pilkada-kota-denpasar-reaktif-covid-19>
- CNN, I. (2020b). 70 Calon Pilkada 2020 Positif Corona, 3 Orang Meninggal. Diambil 29 November 2020, dari Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201124100409-32-573668/70-calon-pilkada-2020-positif-corona-3-orang-meninggal>
- Detik. (2018). Pertama di Indonesia! Kotak Kosong Menang Pilkada. Diambil 29 November 2020, dari Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-4360870/pertama-di-indonesia-kotak-kosong-menang-pilkada>
- detiknews.com. (2020). Sebaran 3.779 Kasus Corona di RI 10 November: DKI Sumbang 1.013. Diambil 29 November 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-5249270/sebaran-3779-kasus-corona-di-ri-10-november-dki-sumbang-1013>
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen risiko korporat*. Jakarta: PPM.
- Gorantokan, E. O. B. (2018). KUALITAS KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014. *JURNAL POLITICO*, 7(2). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30535>

- Hamzah, H. (2020, Agustus). *Pilkada vs pandemi dan pengalaman negara lain*. Presentasi Paper dipresentasikan pada Webinar Nasional FISIP Universitas Mulawarman “Kecenderungan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pilkada, Samarinda.
- Ismanu, M. N. (2020). Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 191–207. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.825>
- Kaltim Today. (2020). Pendaftaran KPPS Diperpanjang, Honorarium di Pilkada 2020 Lebih Tinggi—Kaltim Today. Diambil 29 November 2020, dari <https://kaltimtoday.co/pendaftaran-kpps-diperpanjang-honorarium-di-pilkada-2020-lebih-tinggi/>
- Kompas, C. M. (2020a). Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia. Diambil 29 November 2020, dari KOMPAS.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Kompas, C. M. (2020b). Takut Hasilnya Reaktif, Petugas KPPS Pilkada di Jateng Tolak Rapid Test. Diambil 29 November 2020, dari KOMPAS.com website: <https://regional.kompas.com/read/2020/11/27/16553701/takut-hasilnya-reaktif-petugas-kpps-pilkada-di-jateng-tolak-rapid-test>
- Nuryanti, S., Sweinstani, M. K. D., & Sorik, S. (2020). *Polemik Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Ombudsman. (2019). *Laporan tahunan ombudsman 2019*.
- Rahmad, R., & Fahmi, K. (2019). REKONSTRUKSI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PASCA PEMILU TAHUN 2019. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 149–166. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8143>
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). MENAKAR PERBEDAAN OPINI DALAM AGENDA PELAKSANAAN KONTESTASI PILKADA SERENTAK DI TENGAH COVID-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 4(2), 143–155. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.143-155>

- Sejati, S. B., & Darmaningtyas, D. S. (2019). Jaminan pemerintah terhadap anggota kpps dalam pemilu serentak 2019. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 11(9).
- Sugihariyadi, Moh., & Rahardjo, J. (2015). MENAKAR PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 DI KOTA GARAM: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan. *ADDIN*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/addin.v9i1.609>
- Susanto, A. (2017). DISPROPORSIONALITAS BEBAN TUGAS KPPS STUDI INTEGRITAS PEMILU. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 11.
- Tirto.id. (2019). Ombudsman Keluhkan Penanganan Korban Petugas KPPS Oleh KPU-Bawaslu. Diambil 30 November 2020, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/ombudsman-keluhkan-penanganan-korban-petugas-kpps-oleh-kpu-bawaslu-dPnH>
- Tribunnews.com. (2019). Tim Peneliti UGM Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS, Bukan Diracun—Tribunnews.com. Diambil 30 November 2020, dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/25/tim-peneliti-ugm-ungkap-penyebab-kematian-petugas-kpps-bukan-diracun>

GUYUB

Journal of Community Engagement

P-ISSN: 2723-1232

E-ISSN: 2723-1224

GUYUB: Journal of Community Engagement is a multidisciplinary journal which aims to disseminate the conceptual thoughts and research results in the area of community service. This journal focuses on the main problems of the community engagement areas, such as (1) training, marketing, appropriate technology, design; (2) student community services; (3) community empowerment, social access; (4) education for sustainable development, etc.

GUYUB: Journal of Community Engagement is published three times a year (April, August, December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.



Editorial Office:

GUYUB: Journal of Community Engagement

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: jurnal.guyub@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/index>

